



PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Dwi Ningsih¹⁾; Maylinda Puspitasari²⁾; Syukur Mahadi³⁾ and Umi Rusilowati⁴⁾

Magister Manajemen Universitas Pamulang, dwi.n1n9sih79@gmail.com;
maylindapuspitasi@gmail.com; syukur.mahadi@gmail.com; dosen00061@unpam.ac.id

Abstract

Digital transformation in the delivery of public services has become an urgent necessity in the modern era, especially in supporting bureaucratic reform. This study examines the implementation of information technology through the innovation of "Rumah Digital Si Ki-Be" (Si Ki-Be Digital House) developed by the Regional Office of the Ministry of Law in the Special Region of Jakarta. Rumah Digital Si Ki-Be is an integrated portal that consolidates various service applications, both from internal units of the Ministry of Law and Human Rights and other agencies, to facilitate access and accelerate public service processes. The portal compiles 49 mandatory applications along with internally developed systems to enhance service accessibility for the public. This research uses a qualitative descriptive approach and secondary data analysis through documentation studies of public service innovations from 2023 to 2025. The results indicate that the application of information technology via this digital platform has improved the quality of public services by making them more transparent, efficient, and accountable. However, challenges such as infrastructure readiness, digital literacy, and adaptation to structural changes within the ministry still require attention. The institutional restructuring in 2025 has further necessitated adjustments in the existing service systems. This digital innovation represents a strategic step in realizing good governance and public service delivery oriented toward citizen satisfaction. It serves as a key model for implementing adaptive and sustainable technology-based public services.

Keywords: public service innovation, information technology, digitalization, Rumah Digital Si Ki-Be, bureaucratic reform

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik menjadi kebutuhan mendesak di era modern, terutama dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Penelitian ini mengkaji implementasi teknologi informasi melalui inovasi “Rumah Digital Si Ki-Be” yang diterapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Rumah Digital Si Ki-Be merupakan portal yang mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan, baik dari internal Kementerian Hukum dan HAM maupun instansi lainnya, guna mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan publik. Rumah Digital Si Ki-Be, sebuah portal terpadu yang menghimpun 49 aplikasi mandatori serta aplikasi internal guna memudahkan akses layanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder menggunakan pendekatan studi dokumentasi terhadap inovasi layanan publik yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2025. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi melalui platform digital ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, literasi digital, serta adaptasi terhadap perubahan struktural kementerian masih memerlukan perhatian. Perubahan struktural kelembagaan pada tahun 2025 turut mendorong penyesuaian terhadap sistem layanan yang ada. Inovasi digital ini merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya good governance dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Inovasi ini menjadi model penting dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: inovasi layanan publik, teknologi informasi, digitalisasi, Rumah Digital Si Ki-Be, reformasi birokrasi

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK / WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satuan Kerja yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal. Penetapan Satuan Kerja sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam membangun Zona Integritas mempertahankan WBK dan memperoleh WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta diperlukan Monitoring dan Evaluasi mengenai peningkatan fasilitas yang ada untuk menunjang peningkatan pelayanan digitalisasi. Digitalisasi dapat berjalan dengan baik dan optimal salah satunya dengan didukung dengan fasilitas yang baik. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indonesia memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang dinamis. Beragam bentuk adaptasi dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan publik, seperti inovasi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi bentuk-bentuk layanan publik. Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik juga terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Sejak tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memiliki beragam inovasi layanan yang menjadi unggulan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih mudah, aman, nyaman, cepat, dan pasti kepada masyarakat. Atas dasar itu Jurnal ini dibuat untuk menyajikan penerapan teknologi informasi terhadap inovasi layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Setijaningrum (2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa pelayanan public (public service) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (2000), diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang

Dari beberapa pengertian tersebut pada prinsipnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung berurutan, yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang, atau suatu organisasi melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Setijaningrum, 2009).

Produk suatu organisasi dapat berupa pelayanan dan produk fisik. Produk birokrasi publik sebagai suatu organisasi publik adalah pelayanan publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud disini adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan public (Setijaningrum, 2009).

Salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara adalah pelayanan publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan Pemerintah yang baik (*good governance*) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur penyelenggaraan *good governance* dapat dilihat dari terselenggaranya pelayanan public yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan. Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintah, serta membangun tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat (Mustanir, 2022).

Tugas pokok dan fungsi aparaturnegara semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparaturnegara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Hal tersebut dapat tercapai dengan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan aparaturnegara yang berfungsi melayani secara profesionalisme, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melaksanakan maupun mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mustanir, 2022).

Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan (Mustanir, 2022)

Dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien juga mendorong penerapan e-government dan digitalisasi layanan yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintah secara online juga menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DKI Jakarta menggunakan aplikasi yang bersumber dari internal Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI dan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 49 aplikasi yang bersifat mandatori digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk mendukung tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Guna memudahkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membuat inovasi yang diberi nama “Rumah Digital Si Ki-Be”.

Rumah Digital Si Ki-Be merupakan sebuah portal yang menghimpun semua aplikasi yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta baik aplikasi yang bersumber dari internal Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI, Unit Eselon I Kementerian/Lembaga lainnya dan aplikasi yang dibangun sendiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rumah Digital Si Ki-Be dapat diakses oleh masyarakat melalui laman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu www.jakarta.kemenkumham.go.id yang mana pada tahun 2025 ini, dikarenakan adanya perubahan Kementerian Lembaga pada Kabinet Merah Putih sehingga laman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta sehingga terjadi pula perubahan laman website menjadi <https://jakarta.kemenkum.go.id>.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis penelitian menggunakan metode kualitatif yang diawali dari arti pelayanan public menurut berbagai ahli, kemudian analisis dilanjutkan dengan menganalisis konsep kualitas pelayanan public melalui inovasi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dan konsep good governance dalam perspektif pelayanan public.

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi yang lebih luas dari realitas sosial. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia. Dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Sejumlah teknik pengumpulan data digunakan dalam metode kualitatif, di antaranya adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam dari narasumber, sementara observasi partisipatif memungkinkan mereka untuk menggali konteks secara langsung. Analisis dokumen membantu dalam memahami latar belakang dan konteks data yang telah ada. Kombinasi (Rachman, et.al, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Digital Si Ki-Be merupakan sebuah portal yang menghimpun semua aplikasi yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta baik aplikasi yang bersumber dari internal Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI, Unit Eselon I Kementerian/Lembaga lainnya dan aplikasi yang dibangun sendiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Terdapat 49 (empat puluh Sembilan) aplikasi yang bersifat mendatori dan 4 (empat) aplikasi yang sibangun oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rumah Digital Si Ki-Be mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui soft Launching pada tanggal 14 Juni 2023. Dari data yang ada, selama 3 (tiga) tahun, Rumah Digital Si Ki-Be mengalami perubahan setiap tahunnya.

Table 1. Perubahan Layanan Pada Rumah Digital Si Ki-Be

Tahun	2023		2024		2025
Aplikasi	1. SAKTI	28. ERB	1. SAKTI	28. ERB	1. E-Posbankum
	2. OM SPAN	29. P2MA	2. OM SPAN	29. P2MA	2. S-MPDN
	3. GPP	30. SIPPN	3. GPP	30. SIPPN	3. E-Raperda
	4. DIGIT	31. E-Lapor	4. DIGIT	31. E-Lapor	4. SIDBANKUM
	5. DJP Online	32. SIPIDU	5. DJP Online	32. SIPIDU	5. JDIHN
	6. MPN-G3	33. WBS	6. MPN-G3	33. WBS	6. Kewarganegaraan
	7. SIMAN	34. Ijin Tinggal	7. SIMAN	34. Ijin Tinggal	7. MEREK
	8. E-BMN	Keimigrasian	8. E-BMN	Keimigrasian	8. E-Hak Cipta
	9. E-Catalogue	35. Cekal Online	9. E-Catalogue	35. Cekal Online	9. Perseroan
	10. LPSE	36. APAPO Backend	10. LPSE	36. APAPO Backend	Perseorangan
	11. Sipastiku	37. LHI	11. Sipastiku	37. LHI	10. Apostille
	12. Toko Daring	38. SDP	12. Toko Daring	38. SDP	
	13. Bela	39. I-PAS	13. Bela	39. I-PAS	
	Pengadaan	40. 3AS	Pengadaan	40. 3AS	
	14. SIRUP	41. KKPHAM	14. SIRUP	41. KKPHAM	
	15. Sisumaker	42. P2HAM	15. Sisumaker	42. P2HAM	
	16. SiASN	43. SIMAS HAM	16. SiASN	43. SIMAS HAM	
	17. E-ABK	44. SIDBANKUM	17. E-ABK	44. SIDBANKUM	
	18. SiMutasi	45. JDIH	18. SiMutasi	45. JDIH	
	19. SIMPEG	46. Hai Penyuluh	19. SIMPEG	46. Hai Penyuluh	
	Kumham	47. Sikibe Membaca	Kumham	47. Sikibe Membaca	
	20. Siondel K3	48. Sikibe Harmoni	20. Siondel K3	48. Sikibe Harmoni	
	21. SIMWas	49. Kewarganegaraan	21. SIMWas	49. Kewarganegaraan	
	22. E-LHKPN	50. E-MPDN	22. E-LHKPN	50. E-MPDN	
	23. Seraya	51. MEREK	23. Seraya	51. MEREK	
	24. E-	52. CIPTA	24. E-	52. CIPTA	
	Performanc	53. Perseroan	Performance	53. Perseroan	
	e	Perseorangan		Perseorangan	
	25. E-Tarja		25. E-Tarja		
	26. E-Monev		26. E-Monev	54. Pitung	
	Bappenas		Bappenas	55. Si Jabrik	
	27. SMART		27. SMART		

1. Menu Divisi Administrasi pada Rumah Digital Si Ki-Be.

- a) Terdapat 14 (empat belas) aplikasi pada sub bidang Keuangan di Divisi Administrasi:

1	SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung Implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran
2	OM SPAN	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi



		OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web
3	GPP	Aplikasi GPP adalah suatu aplikasi berupa sistem yang berkaitan dengan pembuatan langkah awal Gaji Pegawai, Uang Makan Pegawai, Kekurangan Gaji Pegawai dan lainnya menyangkut keuangan pegawai
4	DIGIT	DIGIT (Digital Treasury) merupakan aplikasi single sign on (SSO) yang mempermudah pelayanan kepada pengguna. Dengan satu akun saja, pengguna sudah dapat mengakses seluruh aplikasi yang terdaftar pada DIGIT
5	DJP ONLINE	DJP Online adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT Pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing & e-Billing Pajak
6	MPN-G3	MPN-G3 merupakan salah satu sistem yang dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, dan tepat waktu. Juga sebagai perwujudan peningkatan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan penyetoran penerimaan negara lainnya
7	SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, merupakan aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna Barang
8	E-BMN	Manajemen BMN terpadu Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, status penggunaan dan pengamanan, penjualan, penghapusan dan pemindahtanganan.
9	e-Catalogue	Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki ruang lingkup lebih kecil dari e-catalogue nasional
10	LPSE	Unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik
11	SiPASTIKU	Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Kemenkumham Unggul
12	Toko Daring	Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace dan ritel daring
13	Bela Pengadaan	aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace
14	SIRUP	Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

		berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
--	--	--

- b) Terdapat 9 (sembilan) aplikasi pada sub bidang kepegawaian di Divisi Administrasi:

1	SiSumaker	Aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar
2	SiASN	Sistem Informasi Kepegawaian ASN yang dapat dipergunakan sebagai platform dalam pemberian pelayanan kepegawaian. Jenis layanan yang dapat dilakukan SIASN adalah Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pencantuman Gelar
3	E-ABK	Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan
4	Si-Mutasi	Aplikasi yang digunakan untuk layanan usulan Kenaikan Pangkat golongan IVa ke atas
5	Simpeg	Aplikasi yang digunakan untuk layanan database kepegawaian
6	Si Ondel	Aplikasi yang digunakan untuk layanan pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami
7	SIMWas	Aplikasi yang digunakan untuk dokumentasi data base Hukuman Disiplin
8	E-LHKPN	Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan Harta Kekayaan ASN Penyelenggara Negara
9	SERAYA	Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan Harta Kekayaan seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- c) Terdapat 4 (empat) aplikasi pada sub bidang Program dan Pelaporan di Divisi Administrasi:

1	E-Performance	Aplikasi pemantauan dan pengendalian kinerja
2	E-Tarja	Aplikasi monitoring target kinerja dan action plan
3	E-Monev Bappenas	Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja-K/L)
4	SMART	Aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

- d) Terdapat 6 (enam) aplikasi pada sub bidang Humas di Divisi Administrasi:

1	ERB	Aplikasi E-RB adalah sistem penilaian kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbasis aplikasi secara online
2	P2MA	Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA) merupakan suatu aplikasi yang dibentuk oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama yang berkolaborasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal. Dalam memenuhi kebutuhan dalam melakukan penyimpanan dan publikasi kerja sama dibutuhkan suatu aplikasi



		yang dapat secara langsung memberikan informasi terkait kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3	SiPPN	Media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi sertamekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat
4	E-Lapor	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Kementerian PAN- RB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik
5	SIPIDU	Aplikasi pengaduan terpadu atau satu pintu yang dapat diakses dan dikelola oleh Inspektorat Jenderal, Unit Utama, Kantor Wilayah hingga UPT. SIPIDU juga dimaksudkan untuk menggabungkan data pengaduan yang ada sehingga dapat mempercepat pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
6	WBS	Aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan sebagai media untuk melaporkan suatu informasi atau perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Sebagai Pengawas Pelayanan Publik

2. Menu Divisi Keimigrasian pada Rumah Digital Si Ki-Be.

Terdapat 4 (empat) aplikasi pada Divisi Keimigrasian:

1	Ijin Tinggal Keimigrasian	Aplikasi Permohonan Izin Tinggal Online merupakan Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara online
2	Cekal Online	Aplikasi yang terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi subjek yang dikenakan pencegahan atau penangkalan
3	APAPO Backend	Aplikasi yang digunakan untuk membuat kuota percepatan/vip untuk satuan kerja imigrasi
4	LHI	Aplikasi Penyampaian laporan intelijen keimigrasian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berisi laporan harian Intelijen Keimigrasian sehingga mampu memberikan informasi kepada pimpinan melalui kegiatan baik sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta memudahkan petugas imigrasi dalam hal pengawasan

3. Menu Divisi Pemasarakatan pada Rumah Digital Si Ki-Be.

Terdapat 2 (dua) aplikasi pada Divisi Keimigrasian:

1	SDP	Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2	I-PAS	I-Pas adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk para mahasiswa/i yang ingin mengajukan kegiatan penelitian di UPT Pas dan para siswa SMA/SMK yang ingin melaksanakan kegiatan magang di UPT Pas serta masyarakat umum atau Yayasan yang ingin melakukan kegiatan kerohaniawan di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta

4. Menu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Rumah Digital Si Ki-Be.

- a) Terdapat 4 (empat) aplikasi pada bidang HAM di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM:

1	3AS	Aplikasi Monitoring dan evaluasi hasil survei IPK IKM dan Integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah
2	KKP-HAM	Aplikasi yang digunakan utk memantau dan memotivasi sejauh mana Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM. Bagi masyarakat
3	P2HAM	Aplikasi P2HAM adalah aplikasi yg bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada UPT dan Pemerintah daerah
4	SIMAS HAM	Aplikasi Sistem informasi Yankomas ham. merupakan aplikasi berbasis jaringan internet yang dpt di gunakan utk menyampaikan komunikasi terkait dugaan pelanggaran HAM oleh masyarakat di manapun berada selama masyarakat dapat terhubung dg jaringan internet.

- b) Terdapat 5 (lima) aplikasi pada bidang Hukum di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM:

1	SIDBANKUM	Aplikasi yang dirancang untuk memonitoring sistem Reumbersment Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
2	JDIH	Aplikasi tentang sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat
3	HAI PENYULUH	Aplikasi yang berkaitan dengan Pelayanan dan Informasi Hukum yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Terdapat fitur-fitur

		yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan stakeholder terkait. Konsultasi hukum, kelurahan sadar hukum, jadwal penyuluhan hukum, permohonan penyuluhan hukum, dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum, profil penyuluh, informasi hukum, organisasi bantuan hukum, serta pertanyaan dan jawaban
4	Si Ki-Be Membaca	Aplikasi pendataan dan manajemen buku yang memudahkan pegawai atau masyarakat umum untuk mencari dan melakukan peminjaman buku pada perpustakaan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dilengkapi dengan Ruang Administrator dan Ruang Anggota sehingga proses peminjaman, pengembalian dan pencatatan dapat dilakukan dengan mudah
5	Si Ki-Be Harmoni	Aplikasi ini digunakan untuk penginputan permohonan pewarganegaraan (naturalisasi) yang nantinya akan di verifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disesuaikan dengan dokumen asli

c) Terdapat 5 (lima) aplikasi pada bidang Pelayanan Hukum di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM:

1	Kewarganegaraan	Aplikasi ini digunakan untuk menginput berkas permohonan pewarganegaraan Pasal 3A dan Pasal 8
2	E-MPDN	Aplikasi terkait pengadministrasian MPDN
3	MEREK	Aplikasi pendaftaran Hak Merek
4	CIPTA	Aplikasi pendaftaran Hak Cipta
5	Perseroan Perseorangan	Aplikasi pendaftaran perseroan perorangan

Pada tahun 2025, terjadi perubahan yang signifikan pada aplikasi Rumah Digital Si Ki-Be dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian pada Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Hukum dan HAM di restrukturisasi menjadi 4 Kementerian yaitu:

1. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian HAM;
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sehingga menyebabkan laman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu www.jakarta.kemenkumham.go.id menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta sehingga laman website menjadi <https://jakarta.kemenkum.go.id>. Hal ini menyebabkan perubahan aplikasi yang ada pada Rumah Digital Si Ki-Be berisi 10 layanan yang terdiri dari:

1. E-POSBANKUM
2. E-MPDN
3. E-RAPERDA
4. SIDBANKUM
5. JDIHN
6. KEWARGANEGARAAN
7. MEREK
8. E-HAKCIPTA

9. PERSEROAN PERSEORANGAN 10. APOSTILLE



BERANDA

BUKU MANUAL

PROSEDUR LAYANAN

DAFTAR TAYANG

SURVEY



Aplikasi Berdasarkan Tujuan Pengguna

Semua Divisi Pelayanan Hukum Divisi Perundang-undangan & Bantuan Hukum



E-POSBANK



E-PPDR



E-RAPERDA



E-BERKAS



JDIH



KEMERDEKAAN



KEM



E-SHAGITA



PERUBAHAN PERUNDAGAN



APOSTILLE



Gambar 1. Halaman depan Rumah Digital Si Ki-Be pada tahun 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan teknologi informasi dalam layanan publik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi utama melalui pengembangan **Rumah Digital Si Ki-Be** menjadi bukti nyata transformasi digital yang menyatukan berbagai aplikasi layanan dari internal maupun eksternal kementerian. Dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan dalam satu portal, masyarakat kini dapat

mengakses informasi dan layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan rakyat, serta menjawab tantangan zaman melalui pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan. Namun demikian, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan nyata yang perlu diperhatikan, seperti kesenjangan literasi digital, kesiapan infrastruktur, serta penyesuaian terhadap perubahan kelembagaan pasca restrukturisasi kementerian pada tahun 2025. Oleh karena itu, upaya digitalisasi ini harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan (*human-centered service*), agar transformasi yang terjadi bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga perubahan budaya pelayanan yang lebih empatik dan berkeadilan. Inovasi ini menjadi wujud nyata adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat serta implementasi prinsip *good governance* melalui pelayanan publik berbasis digital, yang efisien dan responsif terhadap dinamika zaman.

Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyempurnaan layanan melalui survei, forum dialog, atau kanal aspirasi perlu diperkuat agar layanan digital benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital harus dilakukan secara persuasif, edukatif, dan ramah, sehingga tidak ada warga yang merasa tertinggal dalam arus perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Mustanir, Ahmad. (2022). *Pelayanan Publik*. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, Jawa Timur.
- Rachman, et.al. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Saba Jaya Publisher: Karawang
- Setijaningrum, Erna. (2009). *Inovasi Pelayanan Publik*. Medika Aksara Globalindo: Surabaya.